

STRATEGI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

^aRendi Prayuda, ^bDian Venita Sary

^{a,b}International Relations Department, Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Islam Riau

^arendiprayuda@soc.uir.ac.id, ^bdianvntsry@student.uir.ac.id

Abstract

The development of technology and industrialization in the economy today are two things that contradict the preservation of the world's environment. The concept of sustainable development is one of the efforts to preserve the environment. Indonesia is one of the countries that supports the implementation of the concept of sustainable development, one of the steps being the concept of Blue Economy. As a maritime country, Indonesia has considerable biodiversity, so the Blue Economy concept is seen as more efficient. because it tries to offer solutions to the challenges of the world economy with a system that tends to be exploitative for patterns of management in the marine and fisheries sector that can currently be recognized as still not optimal. This article uses the concept of Blue Economy theory with descriptive qualitative research methods. The implementation of the concept of Blue Economy in community empowerment in coastal areas is carried out by revitalizing sustainable development by using the concept of aquaculture digitalization to support food independence and maritime security through the development of downstream fisheries products that are competitive and innovative to support Indonesia's sustainable national development.

Keywords: *Blue Economy, Empowerment, Society and coast area.*

Abstrak

Perkembangan teknologi dan industrialisasi dibidang ekonomi saat ini menjadi dua hal yang kontradiksi terhadap kelestarian lingkungan dunia. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia adalah salah negara yang mendukung implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satu bentuk langkahnya adalah konsep *Blue Economy*. Sebagai negara maritim maka Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang cukup besar, maka konsep *Blue Economy* dipandang lebih efisien. Karena mencoba menawarkan solusi untuk tantangan ekonomi dunia dengan sistem yang cenderung eksploitatif untuk pola manajemen sektor Kelautan dan perikanan yang saat ini dapat diakui masih belum optimal. Artikel ini menggunakan konsep teori *Blue Economy* dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Implementasi konsep *Blue Economy* dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi akuakultur untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan dibidang maritime melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunannasional Indonesia yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Blue Economy, Pemberdayaan, Masyarakat, dan Pesisir*

Latar Belakang

Artikel ini merupakan sebuah tulisan yang menganalisis tentang implementasi konsep pembangunan berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) di wilayah pesisir. Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan yang menjadi kerja global. Dalam pembangunan berkelanjutan perlu dikhawatirkan akan munculnya tantangan-tantangan global baru terkait dengan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan yang menjadi salah satu isu-isu yang tidak ada habisnya. Terlebih bahwa Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan pada sebuah tantangan yang cukup berpotensi dan besar yakni terkait persaingan perdagangan bebas di level wilayah regional yang disebut pula *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Contohnya adalah: (1) ketidakmampuan Indonesia untuk bersaing akibat kurangnya SDM yang berkualitas dibidang maritim. (2) Eksploitasi yang berlebihan sehingga dapat merusak ekosistem alam. (3) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga peningkatan ekonomi nasional menurun. (4) Ketidaksinkronan antara masyarakat

dan pemerintah sehingga menimbulkan ketimpangan kebijakan. Berdasarkan hal itu maka mendasari konsep pembangunan berkelanjutan tersebut memberikan suatu arahan mengenai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang bersinergi dimana merupakan poin penting dari 3 dimensi *sustainable development* dalam aspek pembangunan global ke depan untuk mengatasi kesenjangan masyarakat nasional sekaligus menjawab apakah Indonesia mampu bersaing dikengah regional dan terlibat langsung dengan pasar bebas yang disebut dengan (*AEC*).

Konsep pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya telah disepakati oleh Indonesia sejak 2015 silam yang merupakan pembaharuan terkait konsep dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Kesepakatan SDGs memiliki 17 tujuan yang didalamnya terdapat kualitas pembangunan masing-masing negara. Jika pada awalnya MDGs hanya memiliki 8 tujuan, konsep SDGs ini meningkatkan tujuan-tujuan yang mendasar pada 5 prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, serta lingkungan, yaitu *people, planet, prosperty, peace, dan partnership*. Dalam pengembangan

konsep SDGs yang belum optimal ini perlu adanya kontribusi yang melibatkan peranan dari *stakeholder* atau dari kalangan non-pemerintah seperti, *civil society organization*, akademisi, Mahasiswa, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan berbasis wilayah maritim sebagai salah satu tujuan negara poros maritim dunia, maka pembangunan terhadap wilayah pesisir perbatasan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan maritim tersebut. Dengan Poros Maritim dunia, Indonesia akan menjadi negara dengan identitas maritim yang kuat. Pemberdayaan seluruh masyarakat pesisir dalam sektor poros maritim dapat menjadi faktor pemerataan ekonomi Indonesia. Lekat dengan budaya orientasi darat membuat masyarakat tidak mengetahui isu-isu maritim. Padahal pemberdayaan di sektor kemaritiman dapat menjadi instrumen bagi Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih unggul dan berpengaruh terhadap pasar ekonomi regional maupun internasional. Oleh karena itu pengembangan konsep

berkelanjutan yang didasarkan pada konsep *Blue Economy* tentu saja dapat mendukung keberhasilan pembangunan yang berbasis pada eksplorasi dan bukan eksploitasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada dasarnya Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Khususnya di wilayah pesisir masih belum terintegrasi dengan baik. Untuk itu, tulisan ini mengagagas suatu strategi Pengimplementasian Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dengan menggunakan konsep *Blue Economy*. Sehingga menciptakan paradig berfikir yang kritis bahwa dengan konsep ini dapat meminimalisir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan sehingga lebih efisien. Konsep *Blue Economy* dalam pemberdayaan masyarakat ini berpotensi untuk digunakan sebagai bahan analisis dan prediksi komplikasi. Selanjutnya, dalam implementasinya, gagasan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa poin aspek yang

menjadi sasaran dalam pembangunan yaitu aspek lingkungan dan aspek sosial.

Pembangunan Berkelanjutan ini dapat diimplementasikan khususnya di wilayah pesisir karena kekuatan pemanfaatan wilayah pesisir dapat mengurangi tantangan ekonomi di Indonesia. Seperti yang tertera bahwa Indonesia 60% masyarakatnya bekerja sebagai nelayan karena Indonesia memiliki poros maritim yang besar. Kemudian sumber daya laut atau pesisir ini menyediakan potensi yang bernilai ekonomi serta ekologis yang tinggi, baik hayati dan non hayati. Maka dari itu, dalam pemberdayaan di wilayah pesisir supaya menguntungkan tanpa mencederai ekosistem perlu adanya konsep *Blue Economy* di mana konsep *Blue Economy* itu sendiri memiliki dinamika pemikiran konsep pembangunan berkelanjutan dengan prinsip ekologis, ekonomi, dan lingkungan.

Istilah *Blue Economy* sebuah pemikiran atau paradigm yang melahirkan suatu konsep baru dengan tujuan menghasilkan arus pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kelestarian sumber daya dan menjaga lingkungan dibidang

kelautan dan perikanan. (Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif C. Sutardjo, 2012). Suatu model pendekatan ekonomi yang dihasilkan oleh konsep *blue economy* ini tidak lagi mengandalkan pembangunan yang bersifat kerusakan atau eksploitasi sumber daya berlebihan. Artinya adalah *blue economy* merupakan pemahaman baru yang mendorong perubahan pola dan struktur pembangunan melalui pemanfaatan lingkungan sehingga ini merupakan sekap terjal bagi pembangunan dan lompatan baru untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Melalui rencana meninggalkan praktek ekonomi dengan keuntungan jangka pendek dan menggunakan *low carbon economy* atau ekonomi yang rendah karbon sehingga model dan konsep pendekatan *blue economy* ini nantinya diharapkan mampu meminimalisir interpendensi antara ekosistem dan ekonomi serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang merupakan akibat dari aktivitas ekonomi. Sebagai konsep baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan, *blue economy* akan mengarahkan pembangunan ekonomi yang seimbang antara upaya pengelolaan

lingkungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang *sustain* dan optimal.

Pada prinsipnya pengaplikasian konsep *blue economy* di wilayah pesisir akan memberikan poin lebih dan berpengaruh dalam pembangunan nasional, selain itu juga pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan nasional merupakan basis utama yang diharapkan terwujud. *Blue Economy* diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan porsi besar bagi masyarakat apabila pemerintah mampu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal dan hidup dipesisir dengan menikmati sumber daya alam tanpa merusak nilai-nilai ekosistem yang ada. Dalam kata lain konsep *Blue Economy* bukan hanya *environmental friendly*, tetapi juga menjadi *multiple cash flow* yang artinya ada keuntungan berlipat secara ekonomi karena melalui konsep ini limbah bisa jadi nilai ekonomi untuk menghasilkan produk lain. Dari penjelasan terkait, Indonesia bisa memperhatikan permasalahan dan peluang yang ada dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan Penelitian

Pada esensinya sebagian besar wilayah Indonesia berpasasan dengan perairan serta terdiri dari lautan dan pantai. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Pada arah bagian darat meliputi daratan baik kering atau terendam air, selain itu masih juga dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan daerah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun kegiatan oleh manusia di darat seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya laut serta pantai. Daerah inilah yang pada umumnya masyarakat pesisir menetap dan tinggal. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki interpendensi yang tinggi terhadap sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir merupakan kumpulan individu yang rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, penambang pasir, pembudidaya ikan, dan transportasi

laut yang sama-sama mendiami suatu wilayah pesisir serta membentuk kebudayaan yang khas terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir.

Sejatinya potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir ini cukup besar. Dengan potensi maritim yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan dan menguntungkan kehidupan masyarakat pesisir. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat wilayah pesisir senantiasa dilanda kekurangan, bahkan kehidupan masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Kondisi masyarakat pesisir relatif berada dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan rendah, lingkungan permukiman masyarakat pesisir belum tertata dan terkesan kumuh, melihat kondisi tersebut, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir kian bertambah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Padahal, sebenarnya terdapat potensi yang besar bagi kemaritiman

Indonesia apabila masyarakat pesisir diberdayakan akan mampu meningkatkan ekonomi nasional, menumbuhkan daya saing yang baik dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA. Sasaran lain yang juga harus dipertimbangkan di dalam aspek pembangunan di Indonesia yang juga sangat penting adalah mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir yang seharusnya pemerintah dapat memperhatikan dan mengimplementasikan SDGs dengan salah satu poin yaitu: “*Life Below Water*” (Poin 14) ditambah dengan konsep *Environmentalism* dan *Liberalism* dimana merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperkuat posisinya pada bidang ekonomi yaitu dengan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan menciptakan Lapangan pekerjaan baru disektor maritim atau perikanan. Kemudian juga merupakan salah satu pola kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya *Upgrading* atau meningkatkan daya saing ekonomi adalah dengan menetapkan kebijakan ekonomi kelautan dengan model *Blue Economy* secara *liberalisme* dimana *Blue Economy* merupakan instrument yang dapat

digunakan untuk memperbaiki pola ekonomi dan menciptakan aktivitas yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan dengan bekerjasama dalam pengembangan antara *stakeholder* dan Masyarakat di wilayah pesisir. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan bahasan yang ingin dicapai dalam tulisan ini ialah: “Bagaimana strategi dari pengembangan dan implementasi *Blue Economy* dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia dalam bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?”

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, metode penelitian yang digunakan untuk mendukung pembuatan karya tulis ini adalah berdasarkan metode penelitian hukum normatif atau kualitatif deskriptif dimana menekankan analisa terhadap studi pustaka dan prosedur pengumpulan data bersumber pada bahan yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic karena jenis penelitian ini menghasilkan

penemuan yang sifatnya narasi atau gambaran logika sehingga tidak dapat difokuskan pada angka-angka atau dengan metode kuantifikasi lain. Data yang diperoleh dan diolah adalah daya yang bersumber dari kajian pustaka (sekuder) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur, artikel, Serta situs-situs internet yang menghasilkan suatu rincian dari fenomena yang diteliti dalam karya tulis ini. Kemudian di dalam karya tulis ini, analisis data dimulai dari proses menelaah informasi yang telah diperoleh melalui literature yang tersedia, maka setelah dibaca, ditelaah, dan dipelajari secara keseluruhan informasi, data tersebut dirangkum dalam bentuk kategori sesuai dengan jumlah permasalahan dan aspek penyelesaian masalah dalam penyusunan karya tulis ini.

Studi Literatur

Endang Bidayani, Soemarno, Nuddin Harahab dan Rudianto, 2016, Model Pengelolaan Sumber Daya *Mangrove* di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep *Blue Economy*, ECSOFiM: *Economic and Social of Fisheries and Marine Journal*, November 2016. Dalam

artikelnya yang berjudul Model Pengelolaan Sumber Daya *Mangrove* di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep *Blue Economy*, menjelaskan tentang pendapat mengenai Kerusakan hutan mangrove di Sidoarjo akibat pembakaran liar untuk diperjual belikan kayunya. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menguji terkait faktor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi konsep *blue economy* dalam mensinergikan kebijakan ekonomi. Dalam tulisan ini dijelaskan salah satu penyebab penurunan luasan hutan mangrove tidak didasarkan pada konsep *blue economy* yang diyakini mampu menjadi referensi dan model pembangunan dengan fokus perikanan yang berkelanjutan untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganjurkan agar para pembangun dan *stakeholder* memiliki apresiasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Sidoarjo dan merealisasikan model pengelolaan hutan mangrove berdasarkan *blue economy*. Penelitian ini dapat dikatakan memiliki hubungan dengan penelitian penulis karena juga membahas mengenai uji keefektifan *Blue Economy* sebagai implementasi SDGs untuk meraih target global Indonesia dan memajukan

ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pesisir yang diharapkan dapat terintegritasi dengan Prinsip pengelolaan yang berdasar pada konsep *Blue economy* yang meliputi efisiensi sumber daya, sistem siklus produksi, pengurangan limbah, kepedulian sosial, inovasi dan adaptasi pengelolaan serta tata kelola lembaga pengelolaan sumber daya yang baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga pemerataan kesejahteraan dan perbaikan sumber daya bagi masyarakat pesisir.

Kemudian, berdasarkan studi terdahulu dapat digambarkan bahwa penulis sama-sama menggunakan konsep *blue economy* untuk memajukan ekonomi nasional Indonesia. Bedanya, dalam studi terdahulu penulis tersebut mencoba mengelola sumberdaya alam dan kemudian menguji keefektifitasan serta manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan konsep *blue economy* terhadap sumberdaya tersebut. Sedangkan penulis di sini mencoba mengkaji langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisinya pada bidang ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebelum itu,

pemerintah harus terlebih dahulu memahami aspek penting yang dijadikan pokok dan pola pemikiran bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak pada kelestarian alam yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir tentunya dijadikan sebagai wadah meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan melalui *Blue Economy* dimana konsep *Blue Economy* ini diyakini dan dipandang mampu mensinergikan pola kebijakan ekonomi, infrastruktur, bisnis, sistem investasi, dan menciptakan nilai tambah serta produktivitas yang tinggi. *Blue economy* mampu menjadi referensi atas model pembangunan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, yang menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan mengikuti pola efisiensi alam, namun menghasilkan produk dengan nilai lebih besar, kepedulian sosial dan tanpa limbah Sutardjo (2012). Sehingga dengan hal ini, Indonesia mampu menjadikan konsep *Blue economy* menjadi landasan paradigm untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan mampu

mengolahnya sehingga dapat dijadikan aspek yang mendukung peningkatan ekonomi nasional di era masyarakat ekonomi ASEAN.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pelaksanaannya pengertian Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan yang dilakukan dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat, termasuk pada individu yang mengalami masalah seperti aspek kesejahteraan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merupakan berfokus pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial, seperti: (1) Masyarakat yang berdaya saing, (2) Memiliki kekuasaan atau kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti sikap berani, kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mempunyai mata pencaharian tujuan, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kesehariannya.

Dalam kurun waktu 20-30 tahun kita percaya bahwa untuk dapat bersaing di kenchah internasional kita harus memproduksi lebih dan mencari biaya

yang murah. Saat ini Indonesia telah memasuki era baru pasar bebas, yaitu *Asean Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dalam masa ini, negara kawasan ASEAN lain akan memiliki akses pasar bebas ke Indonesia. Dengan maraknya berbagai produk asing yang masuk, sikap skeptisme akan bahan-bahan non alamiah yang diperjual belikan menjadi momok tersendiri bagi masyarakat, sehingga untuk menjaga generasi mendatang kita harus memilih produk-produk yang sehat dan alami, namun semua barang yang baik bagi tubuh dan lingkungan harganya sangat mahal dan sebaliknya apapun yang berbahaya bagi tubuh dan lingkungan harganya murah. Hal ini tentunya akan sangat bertolak belakang dengan konsep ketahanan pangan yang menuntut suatu ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, serta terjangkau oleh setiap individu secara masif. Salah satu sumber pangan adalah produk perikanan dan kelautan yang sekaligus merupakan potensi pendapatan masyarakat pesisir. Kekurangan dalam mengintegrasikan kekayaan lokal juga

menyebabkan kegagalan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam pesisir.

Pada esensinya di Indonesia terdapat kebiasaan adat istiadat yang selalu dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan ternyata cocok dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sumber daya alam pesisir. Namun penerapan dan pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam menikmati sumber daya alam secara berlebihan menjadi kendala. Sumber daya alam pesisir, dewasa ini sudah semakin banyak disadari banyak orang memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Konsep ini dalam hubungan internasional dinilai mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game dan trade off*" dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi menjadikan paradigma pertumbuhan kemiskinan menjadi semakin dominan di Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa

point penting mengenai keefektifan dan potensi dari pengimplementasian konsep *Blue Economy* ini dalam pemberdayaan masyarakat. Antara lain:

1. Strategi *Blue Economy* menghadapi *Asean Economic Community*

Sejalan dengan garak dan arus perkembangan pembangunan Indonesia di kawasan regionalnya, telah dihadapkan dengan situasi internasional seperti MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean yang pada pembentukannya bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN. Tantangan yang muncul adalah (1) Persentase tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang tinggi (2) Maraknya perbuatan kerusakan dan eksploitasi sumber daya pesisir. (3) Lunturnya norma dan nilai-nilai budaya lokal. (4) Rendahnya integritas dan kemandirian organisasi sosial diwilayah pesisir, dan (5) Minimnya sarana seperti infrastruktur dan unit kesehatan di lingkungan permukiman yang keterbelakang. Untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan melakukan strategi *blue economy* dalam pemberdayaan

masyarakat diwilayah pesisir perlu ditekankan. Masyarakat diajarkan untuk menanggulangi *exploitation risk* yang mana menjadi masalah selama ini dan menunjukkan sebagaimana sumberdaya alam harus digunakan dengan efektif sebab apabila ikan dan hewan laut lainnya dieksploitasi secara berlebihan akan terjadi yang namanya *over fishing*. Sehingga hal tersebut akan merugikan nelayan itu sendiri.

Hal tersebut tidak serta merta murni menjadi kesalahan nelayan atau masyarakat pesisir sepenuhnya. Selain menjadi mata pencarian, masyarakat pada umumnya sengaja memberikan ikan dan menjualnya pada orang asing dengan harga yang murah. Bila terus seperti ini, maka untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean akan menjadi jalan terjal yang sangat berbahaya. Karena ketika berbicara soal masyarakat pesisir, stigma yang muncul adalah kemiskinan, kumuh keterbelakangan dan rendahnya taraf pendidikan. Wajar saja apabila perlu ditekankannya pemberdayaan masyarakat diwilayah ini.

Melihat hal tersebut, maka dengan adanya konsep *Blue Economy* akan

menyadarkan pemerintah untuk mendorong dengan tegas pemberdayaan masyarakat pesisir. Korelasi terkait peran pemerintah dan masyarakat pesisir sangat diharapkan dan dibutuhkan bagi proses pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan budaya maritim guna merealisasikan kejayaan dan kesejahteraan perairan laut dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal terhadap sumber daya laut yang pada prinsipnya memiliki keunggulan komparatif. Dengan pemberdayaan masyarakat mengenai sektor maritim, tentu dapat memicu keberhasilan MEA sehingga dapat segera menjadikan Indonesia sebagai *Global Potential Market*. Karena bukan hanya sekedar menjadi konsumen belaka akan tetapi juga sebagai pengeksport. Selain itu, Indonesia juga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap tempur dan berani bersaing dengan pekerja negara Asean yang lain melalui kebijakan pemerintah yang mampu membangun kembali sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir. Oleh karenanya, agar sektor tersebut memiliki andil dalam menggali potensi di wilayah pesisir diperlukannya penguatan budaya maritime

yang telah luntur dengan cara revitalisasi, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengendalikan iklim ekonomi kondusif dan tetap dalam nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan *environmentally friendly* berdasarkan konsep *blue economy* yang ditawarkan.

2. Pengembangan Konsep *Blue Economy* melalui Konsep Digitalisasi Akuakultur

Di tengah era teknologi saat ini, disebutkan bahwa pada dasarnya teknologi dapat mengkorelasikan kehidupan nyata atau fisik, digital modern serta biologi yang mengubah pola interaksi manusia secara fundamental. (Tjandrawinata, 2016). Dewasa ini, perkembangan teknologi telah mencapai fase Industri 4.0 yang merupakan fase revolusi teknologi di era globalisasi yang dapat mengubah cara pikir dan aktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, transformasi perbuatan dan kompektifitas dari pengalaman hidup yang semulanya berbentuk manualisasi. Di era digitalisasi ini kian hari semakin beragam produk berkembang sehingga sangat memanjakan

konsumen lantaran dapat dengan mudah ditemui atau diperoleh dipasar. Setiap negara didunia dituntut untuk dengan cepat merespon perubahan era digitalisasi ini dengan *integrative* dan dan komprehensif. Di tengah kondisi Indonesia saat ini, adanya revolusi teknologi informasi digital ini memberi peluang untuk dimanfaatkan lebih optimal demi perbaikan peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Konsep dari *Blue Economy* sendiri mengeluarkan pemikiran baru pada sector akuakultur dimana berupa peningkatan produktivias melalui kegiatan budidaya dengan cara manualisasi. Disamping itu industri akuakultur merupakan salah satu contoh pengimplementasian sebuah Usaha Kecil Mikro atau UKM yang pada dasarnya memiliki kontribusi yang cukup besar dalam aspek pengembangan dan peningkatan perekonomian nasional.

Dengan inovasi teknologi seperti ini yang hendaknya terus didorong serta diaplikasikan kepada masyarakat masif agar sektor akuakultur yang terbengkalai dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional oleh masyarakat pesisir itu sendiri. Namun, hambatan serta tantangn

akuakultur dewasa ini adalah terkait bagaimana cara mengatasi kondisi masyarakat agar kebutuhan pangannya tercukupi ditengah permasalahan penurunan tingkat daya dukung lingkungan dan *global climate change* (Perubahan Iklim Global). Belum lagi tidak ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pengimplementasi sektor akuakultur tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini memicu terjadinya keterlambatan pemerataan globalisasi khusus diwilayah pesisir ini. Selain itu UKM Indonesia memiliki kendala berupa minimnya akses terhadap modal dan kesempatan untk dapat terlibat dalam mata rantai produksi global.

Peran pemerintah hanya di aplikasikan pada perkotaan dan pembangunan jalan. Padahal sektor akuakultur yang berbasis digitalisasi ini dapat meraup keuntungan yang signifikan bagi masyarakat pesisir jika di implementasikan secara baik dan berkelanjutan. Bisnis dibidang akuakultur seyogyanya harus bernilai ekonomis sehingga inovasi teknologi yang ditambah akan menciptakan nilai lebih bukan hanya

ekonomi tetapi juga kemajuan negara itu sendiri. Pengembangan dengan *Integrated Aquaculture Business* atau pengembangan bisnis akuakultur secara integrasi dapat dijadikan *sentral model* produksi dalam upaya pengoptimalan efisiensi serta daya saing yang mampu memberikan *multiple cashflow* atau ragam bisnis turunan lain sehingga dapat menambah penyerapan kesempatan bagi tenaga kerja pemula diwilaya pesisir. Mempertimbangkan hal tersebut, maka subsektor perikanan budidaya harus didorong untuk dapat menjadi barometer utama yang mampu bersaing bukan hanya pembangunan perikanan nasional tetapi juga tatanan perdagangan dengan taraf global, yakni dengan cara peningkatan efisiensi, keamanan pangan, jaminan mutu, nilai tambah dan produktivitas yang baik.

3. Implementasi Konsep *Blue Economy* dalam Kerangka Negara Poros Maritim Dunia

Indonesia adalah salah satu *archipelago state* atau kata lain negara kepulauan yang berpotensi dan memiliki keunggulan dibidang perairan maritim dan

kelautan. Pada dasarnya sekitar 80% perdagangan diseluruh wilayah didunia bergantung pada jalur laut karena kargo yang mengirim barang kebutuhan pangan. Sementara itu, terdapat presentase sekisar 60% pengiriman barang dan kebutuhan melalui laut tersebut akan melewati perairan di Indonesia. Sehingga potensi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia secara maksimal guna mencapai kepentingan nasional negara dalam mengembangkan konsep geopolitik dan geostrategi. Poros Maritim juga akan sangat berperan dalam pengembangan mental Indonesia untuk berani mengeksplorasi kekeayaan laut yang memiliki sumber daya alam cukup baik. Faktor ini akan menjadi kunci yang memicu Indonesia menghadapi era MEA. Logika sederhananya adalah posisi strategis yang dimiliki Indonesia sebagai jalur perdagangan dapat dijadikan aspek untuk meningkatkan taraf negara di mata internasional kelak, dan seharusnya Indonesia berpotensi untuk memainkan peranan pion politisnya dalam percaturan politik internasional.

Poros maritim dunia merupakan suatu konsep atau gagasan pemikiran yang

menegaskan bahwa kelautan merupakan fokus utama bangsa Indonesia dan memiliki potensi yang strategis apabila diberdayakan dan direalisasikan dengan baik. Untuk dapat direalisasikan, ada beberapa agena pembangunan yang berfokus terhadap 5 pilar pokok, kelima pilar tersebut adalah: (1) *Redevelopment* atau pembangunan ulang budaya maritim yang dilahirkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. (2) Menjaga sumber daya hayati dan non-hayati diperairan/laut. (3) Menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan pangan pokok laut. (4) Prioritas pemberdayaan serta infrastruktur laut harus diterapkan, dan (5) Memberi konektivitas terhadap kemaritiman negara. Sejatinya, Indonesia telah memiliki segala syarat dan ketentuan yang dibutuhkan sebagai pondasi awal pembangunan pada aspek poros maritim. Dapat dikatakan demikian, karena apabila dilihat dari konisi geografisnya, Indonesia memiliki posisi strategis, yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Memiliki sebesar 93.000 km luas laut nusantara, 54,716 km lebar garis pantai, 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut, serta mencakup 3000 mil wilayah laut. Oleh sebab itu, maka tidak akan terlihat berlebihan apabila dinyatakan

bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia ini memang dikelilingi oleh laut dan sektor utamanya adalah maritim. Berikut ini skema pengembangan tol laut Indonesia, yakni sebagai berikut:



Gambar 1. Tol Laut dalam Pengembangan Poros Maritim di Indonesia

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dianalisis bahwa dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia maka kebijakan pemerintah dalam pengembangan poros maritim dunia Indonesia dapat menjadikan kawasan maritim karena Indonesia berbentuk kepulauan dengan sumber daya alam perairan yang berlimpah. Maka dari itu, konsep *Blue Economy* dapat diimplementasikan di Indonesia karena Indonesia telah memiliki objek yang dapat dijadikan manifestasi dari pengembangan Poros Maritim. Konsep *Blue Economy* ini

memberikan sebuah penjelasan bahwa pembangunan di wilayah pesisir harus didasarkan pada kekuatan dan potensi dari daerah tersebut.

Dengan pembangunan yang didasarkan pada potensi wilayah nantinya akan memberikan dampak kepada pemerintah dalam pemetaan terhadap wilayah tersebut. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah di wilayah pesisir yang dapat dipadukan dengan kondisi wilayah pesisir adalah dengan mengembangkan industri yang berbasis pada potensi perikanan dan perairan masyarakat di wilayah pesisir. Sehingga pendekatan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pengembangan ekonomi masyarakat secara mikro dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan lagi. Langkah upaya yang bisa dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah melakukan *Upgrading* Infrastruktur yang sesuai sasaran. Infrastruktur tersebut adalah infrastruktur

maritim. Apabila telah terbangun maka otomatis pemerintah akan menciptakan lahan/ pasar baru yang dapat bersaing di kenchah internasional, bukan hanya mendorong tumbuhnya aktivitas industry maritim saja akan tetapi langsung memicu dan memunculkan para investor baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, memanfaatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat pesisir yang membudidayakan hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan lain-lain dari laut tidak langsung dijual kepada penampung akan tetapi diberikan sentuhan inovasi sehingga hasil perikanan tersebut memiliki daya saing dan memiliki kualitas harga yang cukup baik sehingga memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap memberdayakan masyarakat di wilayah pesisir.

Kesimpulan

Maka, berdasarkan hasil dan temuan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Indonesia memiliki tantangan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Pertama, pemerintah dinilai kurang dalam

mengupayakan pengoptimalisasi potensi khususnya di wilayah pesisir, selain itu, sosialisasi pemerintah terkait MEA belum terealisasi secara optimal, lantas banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai MEA beserta tantangan dan potensinya. Kedua, masyarakat dinilai cenderung pasif, padahal untuk mewujudkan produktivitas dalam usaha kelautan guna mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia, masyarakat pesisir merupakan faktor sentral utama. Akan tetapi melihat kondisinya, masyarakat enggan untuk turut berpartisipasi dalam pemecahan masalah yang timbul di wilayah tersebut. Maka, dengan aplikasi konsep *Blue Economy* yang menyatu dengan konsep digitalisasi industri akuakultur akan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan lagi potensi wilayah nasional sehingga diharapkan menjadi basis utama untuk meningkatkan ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan porsi besar dalam kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Seperti mensosialisasikan masyarakat dalam even pemanfaatan limbah ikan yang nantinya diharapkan

dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan khalayak ramai dalam efisiensi sumber daya. Sementara itu pengembangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta dapat berdaya saing guna kesejahteraan masyarakat adalah dengan pengembangan daerah yang berpotensi menggunakan konsep *blue economy* sehingga konsep ini menjadi bagian yang mendukung poros maritime dunia. Mengingat telah adanya keinginan pemerintah yang mencoba untuk memfokuskan pembangunan kearah kemaritiman serta penyediaan sumber daya laut yang melimpah bagi masyarakat.

Referensi

Buku

- Armansyah, Andrea, 2008. *“Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kampung Painan Selatan”* Padang: Universitas Negeri Padang.
- Daldjoeni dan A, Suyitno, 2004. *“Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan”*. Artikel Ilmiah.

- Enell and Lof, 1983 M. Enell, J. Lof. "Environmental impact of aquaculture: sediment and nutrient loadings from fish cage culture farming."
- Hakim, MF. 2013. "Blue Economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikanan". *Economic Development Analysis Journal*. II (2)
- Kusnadi. 2002. "Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan" Yogyakarta: LKIS.
- _____. (2005). "Akar Kemiskinan Nelayan", Yogyakarta: LkiS.
- _____. (2009). "Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir". Yogyakarta: Ar-RuzzMedia
- Jurnal**
- Apriliani, K. F. (2014). *Analisis Potensi Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal dalam Upaya Mewujudkan Blue Economy*. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1).
- Bidayani, E. (2016). *Model Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Pesisir Sidoarjo Berdasarkan Konsep Blue Economy* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Budiman, Aida S. 2012, "Masyarakat Ekonomi ASEAN: Konsep Masyarakat Ekonomi ASEA" Work Paper Direktorat Internasional, Jakarta.
- Fabianto, Muhamad Dio dan Berhitu, Pieter Th. (2014). "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat", *Jurnal Teknologi*, 11(2).
- Iskan, Dahlan. (2011). "Komunitas ASEAN 2015: "Membangun Kebersamaan untuk Satu Tujuan", *Jurnal Seminar Nasional Menghadapi ASEAN Community 2015*, Surabaya: Jawa Pos.
- Munawar Noor *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011 *Pemberdayaan Masyarakat*
- Nurhayati, S. (2015). "Blue and Economy Policy" and Their Impact to

- Indonesian Community Welfare*.
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(2),
37-42.
- Rani, F, dan Cahyasari, W. 2015.
“*Motivasi Indonesia Dalam
Menerapkan Model Kebijakan Blue
Economy Masa Pemerintahan Joko
Widodo*”. Transnasional, 7 (1)
- Suatma, Jasa. 2012. “*Kesiapan Indonesia
dalam Menghadapi Asean
Economic Community 2015*”.
Jurnal STIE Semarang, Vol 4, No.
1, Edisi Februari 2012 (Issn : 2252-
7826)
- Tripon, A. 2014. *Innovative technology for
sustainable development of human
resource using nonformal and
informal education. Procedia
Technology*. XII (2014): 598-
603. Vol 18, No 1 (2019): *Jurnal
Akuakultur Indonesia*.
- Wiratraman, Herlambang, (2015) “*Asean
Economic Community: An Analysis
of Legal Framework and Its
Implementation*”, Surabaya: FH
Universitas Airlangga.
- Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional. 2008. “*Pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro kecil dan
Menengah*”
<http://www.bappenas.go.id>.
Diakses tanggal 11 April 2019
- Sutradjo, S.C, 2012. “*KKP ajak dunia
pendidikan kembangkan Blue
Economy*”
[http://puskita.kkp.go.id/i2/index.ph
p/siaran-pers/69-kkp-ajak-dunia-
pendidikan-kembangkan-blue-
economy](http://puskita.kkp.go.id/i2/index.php/siaran-pers/69-kkp-ajak-dunia-pendidikan-kembangkan-blue-economy). Diakses tanggal 11 April
2019.

Website

Indonesian Journal of International Relations, Vol. 3, No. 2, pp. 46-64.
© 2019 Indonesian Association for International Relations
ISSN 2548-4109 electronic
ISSN 2657-165X printed